

ANALISIS PERUBAHAN KINERJA DAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

Oleh
Sutikno

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
E-mail/No. Hp: ticno_89@yahoo.co.id/08123203044

Abstract

This study aims to identify patterns of growth and structural change in the economic sector and to analyze the performance of economic sectors and social-economic impact of the "Lumpur Lapindo" on the area in Sidoarjo. Analyze to identify patterns of growth and contribution to economic sectors and the performance of economic sectors, thus are: Location Qoution, Ratio Analysis of Growth Models, and Analysis Overlay. Based on the results of base analysis, the potential and performance the economic sector before and during the "Lumpur Lapindo" occurred, indicating that the amount of the basic sector and the potential sectors in the District of Porong, Tanggulangin, and Jabon decreased in the event of "Lumpur Lapindo". Based on the results of analysis of social-economic losses from the Lapindo mudflow, the following results are obtained. Lapindo mudflow incident has caused damage to property in the area around the blast center. Damaged assets consist of: 1) Land and buildings housing residents; 2) productive plants such as rice, sugarcane, and pulses; 3) Buildings and equipment; 4) infrastructure such as toll roads, electricity networks, irrigation networks, water network, telecommunications networks, gas pipelines, with total losses estimated at Rp 33.27 trillion.

Keywords: *economic sector, lumpur lapindo, and Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Sejak Juni 2006, upaya penanganan semburan lumpur yang semakin hari semakin membawa dampak merusak mulai dilakukan. Manajemen penanganan lumpur yang difokuskan pada penanggulangan, berhadapan dengan berbagai kendala. Mulai meningkatnya volume semburan yang turun naik, gejolak sosial, rusaknya prasarana transportasi hingga hancurnya ekosistem. Setahun ini, tetap tidak ada kepastian keberhasilan penanganan.

Lumpur Lapindo, yang menyebabkan rusaknya infrastruktur khususnya jalan di Sidoarjo, telah

membuat perekonomian di Jawa Timur turun sekitar 1,3 persen, bahkan apabila kondisi ini tidak cepat diantisipasi akan mengancam perekonomian tidak hanya di Jawa Timur, tetapi hingga taraf nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Jawa Timur meminta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur segera mengamankan rel kereta dan jalan raya Porong dan menjamin akses transportasi tersebut aman untuk dilalui. Hal ini diungkapkan Imam Utomo ketika meninjau langsung luapan lumpur yang menenggelamkan rel dan jalan raya Porong di Desa Siring, Porong, Sidoarjo.

Akibat tertutupnya akses jalan raya Porong dan rel kereta oleh lumpur Lapindo Brantas, kerugian ekonomi di Jawa Timur sangat besar. Sebab, jalan raya Porong merupakan satu-satunya jalur penghubung Surabaya-Malang dan Banyuwangi. Jika jalan raya dan rel tergenang lumpur dan tidak bisa dilalui, gubernur khawatir kerugian ekonomi bagi Jawa Timur akan semakin besar dan akan menimbulkan gejolak sosial yang lain.

Mengacu uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perubahan struktur dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan di masing-masing kecamatan sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo, Perubahan kontribusi dari sektor-sektor unggulan di masing-masing kecamatan sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo, Perubahan kinerja sektor-sektor ekonomi di masing-masing kecamatan dilihat dari aspek pertumbuhan dan kontribusi peningkatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo, dan Dampak sosial dan ekonomi semburan lumpur Lapindo terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjelaskan pembangunan daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Adisasmita (1996), setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembangunan daerah, yaitu: Pendekatan sektoral; Pendekatan makro; dan Pendekatan regional.

Pendekatan sektoral menganggap perlunya mendekatkan pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sub-sub sektor atau sektor-sektor. Adapun dasar berpijaknya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun

kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan atau sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkap secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja maupun investasi dan kredit yang digunakan.

Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat dikelola lingkup nasional maupun daerah seperti Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Dalam hal ini, dimensi wilayah hanya tampil sebagai indeks, yakni untuk melokalisasi sektor-sektor ke dalam daerah-daerah dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

Pendekatan makro pada dasarnya memperhitungkan adanya tiga jenis kekuatan yang bekerja dalam kehidupan manusia, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial dan kekuatan politik. Ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan atau bagian yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, pendekatan makro seperti halnya pendekatan sektoral, tidak ditujukan untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

Pendekatan makro digunakan untuk merencanakan dan mengukur hasil pembangunan nasional secara makro. Perkembangan kehidupan ekonomi diukur di antaranya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi dan tingkat harga barang-barang. Perkembangan kehidupan sosial diukur misalnya melalui tingkat pemerataan dalam penyediaan kesempatan berusaha (kerja) ataupun dalam hal tingkat kesejahteraan hidup dan perkembangan seni dan budaya pada umumnya. Pada sisi lain,

kehidupan politik diukur dengan pelaksanaan hidup berkonstitusi, eksistensi serta peranan kekuatan sosial-politik dan pelaksanaan kehidupan berdasarkan hukum serta pelaksanaan kewajiban hak warga negara pada umumnya.

Pendekatan regional atau pendekatan wilayah berangkat dari kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha selalu terkait dengan wilayah. Dengan kata lain, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak dalam ruang wilayah tertentu. Dalam kaitan ini, pemanfaatan wilayah mencakup aspek lokasi dan aspek dimensi wilayah.

Aspek lokasi wilayah berkaitan dengan fungsi lindung dan pilihan lokasi untuk tempat pemukiman ataupun kegiatan usaha yang kesemuanya ditujukan untuk memperoleh kemudahan bagi masyarakat di wilayah tertentu, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Pada sisi lain, aspek dimensi wilayah berkaitan dengan masalah tata guna tanah seperti petunjuk tentang batas-batas wilayah.

Berdasarkan kedua aspek tersebut di atas, maka pendekatan regional jelas menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral dan bahkan dalam artian peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sumber dorongan tersebut berbeda pada lokasi yang pasti dan memberikan pengaruh besar atau sentral yang selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai kemudahan.

Teori basis ini didasari oleh pemikiran J.S.Mill (1948) yaitu bahwa dalam memecahkan masalah pertumbuhan dan pemerataan regional diisyaratkan adanya perdagangan antar daerah, dengan mewujudkan spesialisasi daerah. Dalam teori basis ini perekonomian regional dibagi menjadi 2,

yaitu kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian yang bersangkutan atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya, meningkatkan nilai investasi dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian agregat. Berdasarkan gagasan inilah, maka para ahli berpendapat bahwa sektor-sektor basis inilah yang seharusnya dikembangkan di suatu daerah.

Pada intinya teori basis ekonomi berusaha menjelaskan perubahan-perubahan struktur perekonomian regional dengan menekankan saling hubungan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian regional dan perambatan kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu sektor ke sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini teori basis ekonomi dapat digunakan untuk menentukan sektor-sektor mana yang sebaiknya dikembangkan sesuai dengan spesialisasi sektor di suatu daerah tertentu.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya penelitian ini tergolong pada penelitian terapan atau sering disebut *applied research*. Menurut Mudrajad (2003) *applied research*, merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu.

Penelitian ini melakukan pengamatan pada pola pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Sidoarjo. Adapun kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo terdiri dari kecamatan: Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Bolongbendo, Wonoayu, Tarik, Prambon, Taman, Waru, Gedangan, Sedati, dan Sukodono.

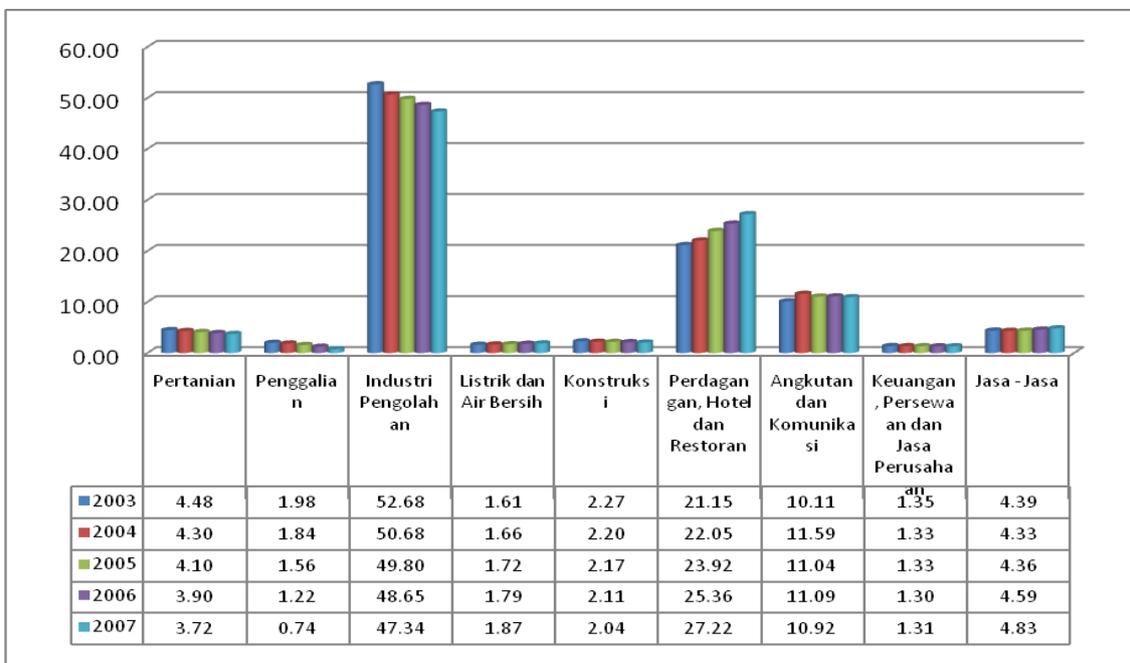
Penelitian ini mengandalkan pada jenis data sekunder atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Adapaun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

data PDRB kabupaten Sidoarjo, PDRB semua kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk kabupaten Sidoarjo, dan pendapatan per kapita.

Studi ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi: Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Analisis Model Overlay.

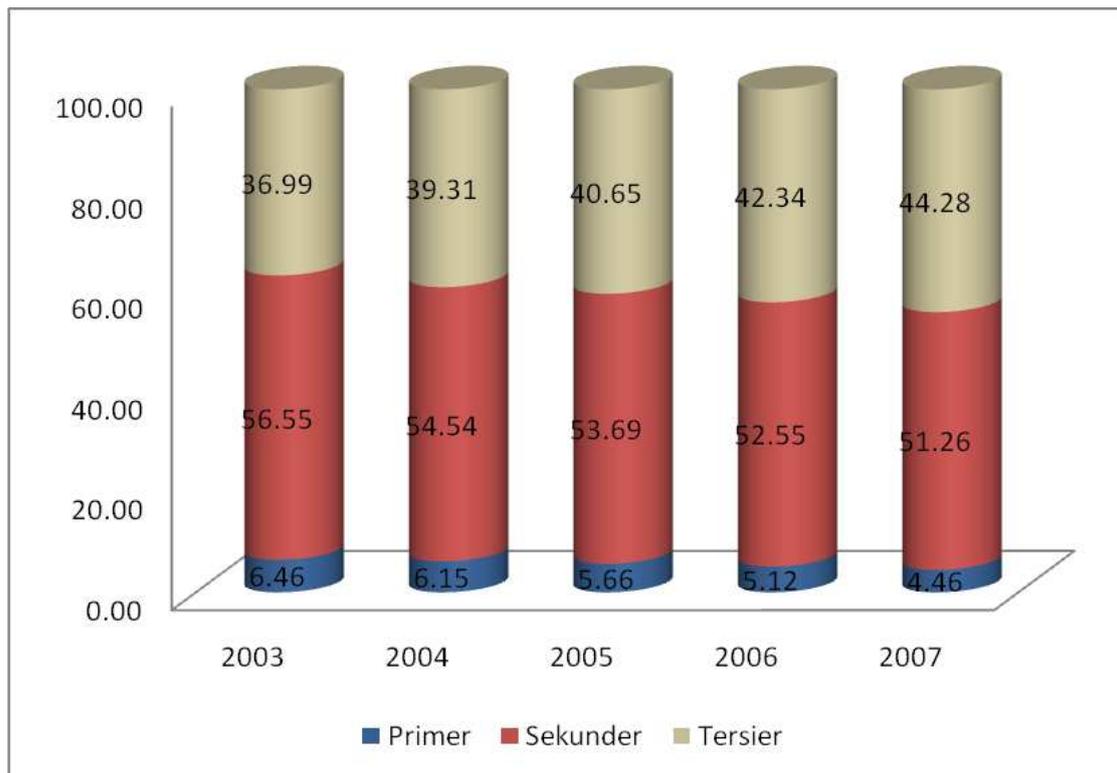
PEMBAHASAN

Indikator hasil pembangunan ekonomi selain dilihat dari besarnya jumlah PDRB, perlu juga dilihat dari distribusi sektoralnya. kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo juga bisa dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dan kelompok sektor ekonomi terhadap total PDRB. Berikut ini gambaran kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir.



Gambar 1. Pertumbuhan Kontribusi Masing-Masing Sektor Ekonomi Kabupaten Sidoarjo (2003 - 2007)

Sumber: Sidoarjo dalam Angka 2008 (diolah)



Gambar 2. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Sidoarjo (2003 - 2007)

Kontribusi sektoral tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Peran sektor di atas dikelompokkan menjadi 3 sektor pokok, yaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Kelompok Sektor primer mencakup sektor pertanian, sektor pertambangan dan Galian. Peranan kelompok sektor primer memberikan kontribusi paling rendah yaitu rata-rata hanya memberikan kontribusi sebesar 5,57%, peran sektor ini didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,10%.

Secara keseluruhan dari tahun 2003 sampai tahun 2007 peran rata-rata sektor primer sebesar 5,57%, sektor sekunder 53,72% dan sektor tertier 40,71%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh sektor Sekunder.

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 Kecamatan yang tentunya masing-masing kecamatan memiliki perbedaan sektor-sektor ekonomi yang mendominasi kecamatan tersebut. Berikut ini struktur ekonomi masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Kontribusi PDRB Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kelompok Sektor Tahun 2005 dan 2007 (Persentase)

No	Kecamatan	2005			2007		
		Primer	Sekunder	Tertier	Primer	Sekunder	Tertier
1	Tarik	5.26	88.55	6.19	4.81	88.87	6.32
2	Prambon	15.76	57.61	26.63	15.50	56.06	28.45
3	Krembung	27.11	61.09	11.80	17.29	68.61	14.10
4	Porong	34.32	44.52	21.15	37.50	26.70	35.80
5	Jabon	35.55	56.05	8.41	38.33	51.52	10.15
6	Tanggulangin	8.92	79.19	11.89	8.56	75.64	15.80
7	Candi	4.72	81.67	13.62	4.22	81.90	13.88
8	Tulangan	10.15	67.86	21.99	9.42	66.66	23.92
9	Wonoayu	12.96	63.30	23.75	11.97	62.99	25.04
10	Sukodono	9.95	62.24	27.81	8.67	61.97	29.36
11	Sidoarjo	2.51	33.87	63.61	2.19	32.20	65.61
12	Buduran	9.63	74.30	16.07	9.05	73.75	17.20
13	Sedati	6.21	13.46	80.32	5.94	13.67	80.39
14	Waru	0.31	58.70	40.99	0.25	54.32	45.43
15	Gedangan	0.92	88.41	10.67	0.76	87.77	11.47
16	Taman	0.83	52.55	46.62	0.66	48.86	50.48
17	Krian	2.47	58.41	39.12	2.09	55.34	42.57
18	Balombendo	17.96	57.79	24.25	17.08	56.83	26.09

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kecamatan, 2007 (diolah)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo didominasi Sektor Sekunder yaitu sebanyak 16 kecamatan pada tahun 2005. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Buduran, Waru, Gedangan Taman, Krian, dan Balongbendo.

Untuk 2 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Sedati didominasi oleh Sektor Tertier. Pada

tahun 2005 dan 2007 kecamatan-kecamatan tersebut tetap didominasi oleh Sektor Tertier dengan angka tertinggi pada kecamatan Sidoarjo yaitu sebesar 2.293.416.552 (Ribuan Rupiah) pada tahun 2005 dan 2.822.363.410 (Ribuan Rupiah) pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kecamatan Sidoarjo dan Sedati didominasi oleh Sektor Tertier. Adapun perkembangan PDRB Kecamatan yang terkena semburan lumpur lapindo adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Kecamatan yang Terkena Semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kelompok Sektor Tahun 2005 dan 2007 (Ribuan)

No	Kecamatan	2005 (Sebelum)			2007 (Sesudah)		
		Primer	Sekunder	Tertier	Primer	Sekunder	Tertier
1	Krembung	121,698,057	274,193,495	52,965,952	75,349,142	299,035,656	61,433,847
2	Porong	218,972,871	284,023,314	134,948,894	129,519,509	92,224,081	123,639,119
3	Jabon	129,864,360	204,758,405	30,714,832	124,791,840	167,741,138	33,029,822
4	Tanggulangin	65,864,970	584,902,704	87,846,406	50,129,753	442,998,159	92,516,147
5	Candi	46,864,917	811,317,251	135,275,708	46,302,552	897,720,033	152,148,050
6	Tulangan	34,652,770	231,561,947	75,023,800	35,029,279	247,972,743	88,969,501

Sumber: PDRB Kabupaten dan Kecamatan, 2007 (diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui terjadinya penurunan PDRB di kecamatan yang terkena semburan lumpur lapindo, khususnya yang sudah terkena sejak awal yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Sedangkan untuk Krembung, Candi dan Tulangan merupakan daerah yang baru saja masuk dalam wilayah semburan lumpur lapindo.

Penentuan sektor unggulan masing-masing kecamatan tersebut didasarkan pada Sektor Basis dan Sektor Potensi. Sektor Basis merupakan sektor yang secara relatif mempunyai kontribusi melebihi rata-rata dibanding sektor lainnya. Sedangkan Sektor Potensi adalah sektor yang secara relative mempunyai pertumbuhan melebihi rata-rata dibanding sektor lainnya.

Sebelum terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor basis paling banyak adalah Kecamatan Prambon, Tanggulangin, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Taman, Krian, serta Balongbendo mempunyai 5 sektor Basis. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor basis adalah Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 14 sub sektor Basis.

Setelah terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor basis paling banyak adalah Kecamatan Prambon, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Krian, serta Balongbendo mempunyai 5 sektor Basis. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor basis adalah Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 14 sub sektor Basis.

Sebelum terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor potensi paling banyak adalah Kecamatan Sidoarjo mempunyai 7 sektor potensi. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor potensi

juga Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 16 sub sektor potensi.

Setelah terjadi lumpur lapindo, kecamatan yang mempunyai sektor potensi paling banyak adalah Kecamatan Sidoarjo, Taman, dan Krian masing-masing mempunyai 6 sektor Potensi. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor Potensi hanya Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 18 sub sektor Potensi.

Berikutnya yaitu mengkombinasikan sektor basis dengan sektor potensi yang bertujuan untuk menentukan sektor dan sub sektor basis dan juga mempunyai tingkat potensi tinggi bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Berdasarkan kombinasi di atas, maka sektor dan sub sektor di masing-masing kecamatan dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu: 1) K1 = Sektor Basis dan Sektor Potensi; 2) K2 = Bukan Sektor Basis, tapi Sektor Potensi; 3) K3 = Sektor Basis, tapi Bukan Sektor Potensi; 4) K4 = Bukan Sektor Basis dan Bukan Sektor Potensi.

Sebelum terjadi lumpur lapindo, Kecamatan yang mempunyai sektor klasifikasi K1 paling banyak adalah Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, dan Taman masing-masing mempunyai 3 sektor Klasifikasi K1. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor Klasifikasi K1 hanya Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 12 sub sektor Klasifikasi K1.

Kecamatan yang mempunyai sektor Klasifikasi K1 setelah peristiwa Lumpur Lapindo paling banyak adalah Kecamatan Wonoayu, Buduran, dan Krian mempunyai 4 sektor Klasifikasi K1. Sedangkan kecamatan yang paling banyak mempunyai sub sektor Klasifikasi K1 hanya Kecamatan Sidoarjo, kecamatan ini memiliki 12 sub sektor Klasifikasi K1.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Sektor Basis, Sektor Potensi dan Sektor Unggulan Sebelum dan Sesudah Semburan Lumpur Lapindo di Enam Kecamatan

No	Kecamatan	Sebelum		Sesudah	
		Sektor	Sub Sektor	Sektor	Sub Sektor
Sektor Basis					
1	Porong	3	8	3	9
2	Tanggulangin	5	7	5	8
3	Jabon	4	7	4	7
4	Krembung	4	8	4	8
5	Tulangan	5	10	5	10
6	Candi	5	9	4	9
Sektor Potensi					
1	Porong	2	7	1	-
2	Tanggulangin	4	8	1	2
3	Jabon	2	4	1	3
4	Krembung	1	4	1	4
5	Tulangan	2	3	3	6
6	Candi	2	3	2	4
Sektor Unggulan					
1	Porong	-	5	1	-
2	Tanggulangin	2	4	1	1
3	Jabon	1	3	-	2
4	Krembung	1	3	1	2
5	Tulangan	1	2	2	5
6	Candi	1	1	1	2

Sumber: PDRB Kecamatan, 2003-2007 (diolah)

Berdasarkan analisis sektor basis, sektor potensi dan sektor unggulan maka dapat diketahui perubahan akibat terjadinya semburan lumpur lapindo. Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon merupakan daerah yang terlebih dahulu masuk wilayah semburan sehingga terjadi perubahan yang besar. Berbeda dengan 3 kecamatan lainnya yang baru saja masuk dalam wilayah semburan lumpur lapindo, sehingga belum terjadi perubahan yang berarti.

Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo telah menimbulkan kerusakan aset di areal sekitar pusat semburan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan wilayah regional lainnya. Aset yang rusak terdiri dari: 1) Tanah dan bangunan hunian penduduk; 2) Tanaman produktif seperti tanaman

padi, tebu, dan palawija; 3) Bangunan dan peralatan pabrik; 4) Infrastruktur seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas; Semburan lumpur tersebut secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat dan dunia usaha di wilayah genangan.

Dalam kasus semburan lumpur PT. Lapindo Brantas, perhitungan Greenomics menyebutkan kerugian yang harus diganti bisa mencapai angka Rp 33,27 triliun. Terdiri dari biaya penanganan sosial, pembersihan lumpur, ekologi, dampak pada pertumbuhan ekonomi, pemulihan bisnis dan ekonomi, biaya kehilangan kesempatan (jangka waktu sangat pendek) dan ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi dampak.

Tabel 4. Perhitungan Kerugian Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo

No	Komponen Biaya	Kerugian (triliun rupiah)
1	Restorasi lahan	3,97
2	Penanganan social	3,59
3	Pembersihan lumpur	4,37
4	Ekologi	4,63
5	Dampak pada pertumbuhan ekonomi	4,34
6	Pemulihan bisnis dan ekonomi	5,79
7	Biaya kehilangan kesempatan (jangka waktu sangat pendek)	2,88
8	Ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi dampak	3,70
	Total	33,27

Sumber: Greenomic Indonesia

Tabel 5. Perkiraan Proporsi Biaya Ekonomi Akibat Semburan Lumpur Lapindo (jutaan Rupiah)

No	Sektor	Konklusif ²⁾		Non-Konklusif ²⁾	
		Nilai	%	Nilai	%
1	Publik/Negara	2.350.000	7,14	2.550.000	7,31
2	BUMN	210.000	0,64	1.010.000	2,89
3	Swasta	970.000	2,95	1.961.000	5,62
4	Masyarakat	29.366.000	89,27	29.372.000	84,18
	Total	32.896.000	100,00	34.893.000	100,00

²⁾ Dibedakan menurut kerugian ekonomi tidak langsung yang sudah jelas (konklusif) dan yang belum jelas (non-konklusif)

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK RI

Kerugian tersebut masih bisa lebih besar, terutama jika terjadi eskalasi dampak turunan lebih luas lagi dalam jangka menengah dan panjang. Besarnya nilai kerugian diakibatkan karena adanya *floating time* (waktu mengambang atau ketidakpastian) penanganan semburan lumpur tersebut.

Adapun perkiraan proporsi biaya ekonomi diperlukan untuk memberi gambaran tentang pembagian beban yang dipikul oleh Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian perlu disadari bahwa pendistribusian beban biaya ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati karena sulitnya memisahkan secara tegas beban biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

Perincian proporsi beban kerugian ekonomi tahun 2006-2015, terlihat pada tabel 5.

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa porsi terbesar dari biaya ekonomi akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo menjadi beban masyarakat. Biaya ekonomi yang nyata menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.366.000.000.000 (89,27%). Biaya ekonomi yang potensialnya menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.372.000.000.000 (84,18%).

Semburan lumpur lapindo akan menimbulkan kerusakan infrastruktur pada wilayah semburan. Nilai kerusakan aset dan infrastruktur akibat dampak langsung semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 5.121.634.660.000, yakni:

Tabel 6. Kerusakan Infrastruktur Akibat Semburan Lumpur Lapindo (jutaan Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	%
1	Kerugian Masyarakat	3.200.978,95	62,50
2	Kerugian Usaha Swasta	376.901,30	7,36
3	Pemerintah Pusat	0,00	-
4	BUMN	57.075,80	1,11
5	Pemerintah Propinsi Jatim	0,00	-
6	BUMD Propinsi Jatim	0,00	-
7	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	0,00	-
8	PDAM Kabupaten Sidoarjo	170,91	0,01
9	Kontraktor Pelaksana	1.486.507,70	29,02
	Total	5.121.634.,65	100,00

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tabel 7. Ekspor/Impor Non Migas Akibat Semburan Lumpur Lapindo

Tahun	Volume (Kg)	Pertumb. (%)	Nilai (US\$)	Pertumb. (%)
2003	6.318,8	-28,79	5.484,3	-12,19
2004	6.739,9	6,66	6.194,5	12,95
2005	6.165,1	-8,53	7.114,1	14,85
2006*	4.631,5	5,41	6.020,0	14,81

*) data s.d September 2006, pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun 2005

Sumber: Disperindag, (diolah BPK RI)

Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung kerugian terbesar secara riil adalah masyarakat sebagai pemilik tanah dan bangunan, yakni sebesar 62,5% dari keseluruhan, selanjutnya adalah kontraktor pelaksana sebesar 29,02, usaha swasta sebesar 7,36%, BUMN sebesar 1,11% dan PDAM Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,01%.

Terputusnya jalur transportasi darat berupa jalur tol Surabaya-Gempol yang merupakan jalur utama keluar masuknya barang (ekspor-impor) mengharuskan institusi/lembaga yang terkait seperti Organda, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Jawa Timur, dan Administratur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan serangkaian tindakan guna memperlancar arus barang ekspor-impor dari dan Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak).

Sehubungan dengan terganggunya jalur transportasi, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yakni ekspor/impor non migas tidak mengalami penurunan, tetapi menambah biaya yang cukup besar, berdasarkan data Disperindag dan GPEI (Tabel 7).

Sedangkan berdasarkan menurut data Organda Provinsi Jawa Timur, jumlah pengusaha otobis (PO) yang melayani trayek, yaitu: Surabaya – Malang : 21 PO, 400 bus, Surabaya – Banyuwangi: 15 PO, 500 bus, Surabaya – Bali: 5 PO, 60 bus,

Jumlah kerugian PO, akibat dari putusnya Tol Gempol – Porong, maka adanya penambahan solar, kehilangan rit dan penurunan penumpang adalah sebesar Rp 629.000,00 per hari.

Berdasarkan klaim kerugian dari PO yang diajukan ke LBI melalui organda selama 25 hari adalah kurang lebih sebesar Rp 12.590,70 juta. Dari klaim tersebut oleh LBI disetujui sebesar Rp 4.460,00 juta dan telah dibayar

sebesar Rp 1.036,00 juta dan telah diserahkan ke masing-masing PO sesuai prosentase yang diajukan.

Menurut hasil survei Dinas Perhubungan menyebutkan empat perusahaan otobus di Malang, yaitu PO Tentrem, PO Restu, PO Pelita Mas dan PO Pertiwi, mengurangi jumlah armada. Dengan rincian sebagai berikut (sumber: www.detik.com): 1) PO Tentrem sebelum lumpur sebanyak 92 unit, setelah lumpur sebanyak 48 unit setiap harinya, atau turun sebesar 47,83%; 2) PO Restu sebelum luapan lumpur sebanyak 200 unit, setelah lumpur sebanyak 95 unit setiap harinya atau turun sebesar 52,50%; 3) PO Pelita Mas sebelum luapan lumpur sebanyak 21 unit, setelah lumpur sebanyak 11 unit setiap harinya atau turun sebesar 47,62%; dan 4) PO Pertiwi sebelum luapan lumpur sebanyak 18 unit, setelah lumpur sebanyak 13 unit setiap harinya atau turun sebesar 27,78%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis struktur ekonomi sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo, baik di wilayah kabupaten maupun masing-masing kecamatan, maka diperoleh temuan sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 peran rata-rata sektor primer sebesar 5,57%, sektor sekunder 53,72% dan sektor tertier 40,71%. Selain itu, Daerah yang terkena dampak ekonomi paling besar adalah kecamatan yang terkena semburan lumpur lapindo sejak awal yaitu kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, daerah ini mengalami penurunan PDRB. Sedangkan untuk Krembung, Candi dan Tulangan merupakan daerah yang baru saja masuk dalam wilayah semburan lumpur lapindo.

Berdasarkan hasil analisis sektor basis dan potensi sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo di

masing-masing kecamatan, maka diperoleh temuan: *pertama*, Jumlah sektor basis di Kecamatan Porong, sebelum dan sesudah semburan lumpur lapindo tidak mengalami perubahan, namun untuk sektor potensi mengalami perubahan yaitu sebelumnya 2 sektor dan 7 sub sektor menjadi 1 sektor dan tidak memiliki sub sektor potensi. *Kedua*, Jumlah sektor basis di Kecamatan Tanggulangin, sebelum dan sesudah semburan lumpur lapindo tidak mengalami perubahan, namun untuk sektor potensi mengalami perubahan yaitu sebelumnya 4 sektor dan 8 sub sektor menjadi 1 sektor dan 2 sub sektor potensi.

Ketiga, Jumlah sektor basis di Kecamatan Jabon, sebelum dan sesudah semburan lumpur lapindo tidak mengalami perubahan, namun untuk sektor potensi mengalami perubahan yaitu sebelumnya 2 sektor dan 4 sub sektor menjadi 1 sektor dan 3 sub sektor potensi.

Keempat, Kecamatan Krembung tidak mengalami perubahan Jumlah sektor basis, sektor potensi dan sektor unggulan dikarenakan baru masuk wilayah semburan lumpur lapindo sehingga belum terjadi perubahan yang berarti. *Kelima*, Kecamatan Tulangan tidak mengalami perubahan Jumlah sektor basis, sektor potensi dan sektor unggulan dikarenakan baru masuk wilayah semburan lumpur lapindo sehingga belum terjadi perubahan yang berarti.

Berdasarkan hasil analisis kinerja sektor ekonomi sebelum dan pada saat terjadi semburan Lumpur Lapindo di masing-masing kecamatan, maka diperoleh temuan: *pertama*, jumlah sektor unggulan di Kecamatan Porong sebelum terjadi Lumpur Lapindo ada 5 sub sektor unggulan, setelah terjadi Lumpur Lapindo menjadi 1 sektor dan tidak memiliki sub sektor unggulan.

Kedua, Jumlah sektor unggulan di Kecamatan Tanggulangin sebelum terjadi Lumpur Lapindo ada 2 sektor dan 4 sub sektor unggulan, setelah terjadi Lumpur Lapindo menjadi 1 sektor dan 1 sub sektor unggulan. *Ketiga*, Jumlah sektor unggulan di Kecamatan Jabon sebelum terjadi Lumpur Lapindo ada 1 sektor dan 3 sub sektor unggulan, setelah terjadi Lumpur Lapindo menjadi hanya memiliki 2 sub sektor unggulan. *Keempat*, Kecamatan Krembung dan Tulangan tidak mengalami perubahan jumlah baik sub sektor maupun sektor unggulan yang dimiliki, walaupun terjadi Lumpur Lapindo.

Berdasarkan hasil analisis kerugian sosial ekonomi dari semburan Lumpur Lapindo, maka diperoleh temuan: *Pertama*, peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo telah menimbulkan kerusakan aset di areal sekitar pusat semburan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan wilayah regional lainnya. Aset yang rusak terdiri dari: 1) Tanah dan bangunan hunian penduduk; 2) Tanaman produktif seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; 3) Bangunan dan peralatan pabrik; 4) Infrastruktur seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas, dengan total kerugian ditaksir sebesar Rp 33,27 triliun.

Kedua, Biaya ekonomi langsung di wilayah yang tergenang lumpur pada tahun 2006 sebesar Rp 1.407.936.000.000, dengan rincian sebesar Rp 1.248.939.000.000 berupa hilangnya aset dan Rp 158.997.000.000 berupa hilangnya pendapatan masyarakat secara agregat. *Ketiga*, Biaya ekonomi langsung untuk tahun 2007-2015 mencapai Rp 18.482.427.000.000, dengan rincian Rp 16.434.731.000.000 merupakan kehilangan aset dan Rp 2.047.696.000.000 kehilangan pendapatan. Untuk total keseluruhan

yaitu sebesar Rp. 19.890.364.000.000. *Keempat*, Biaya ekonomi tidak langsung selama 2006-2015 mencapai Rp 7.407.440.000.000. Dua komponen terbesar dari biaya ekonomi tersebut adalah penurunan nilai jual aset Rp 4.367.120.000.000 (58,96%) dan penurunan pendapatan petambak Rp 2.744.460.000.000 (37,05%). Sedangkan komponen terkecil adalah penurunan pendapatan mini bus Rp 2.220.000.000 (0,03%).

Kelima, Bagian terbesar biaya ekonomi dari kegiatan relokasi menjadi beban dari upaya pemulihan pemukiman Rp 2.669.660 juta (47,68%), dan berikutnya adalah untuk pemulihan prasarana publik Rp 2.079.710 juta (37,14%). Sementara itu beban biaya pemulihan usaha hanya Rp 849.790 juta (0,02%). *Keenam*, Porsi terbesar dari biaya ekonomi akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo menjadi beban masyarakat. Biaya ekonomi yang nyata menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.366.000.000.000 (89,27%). Biaya ekonomi yang potensialnya menjadi beban masyarakat sebesar Rp 29.372.000.000.000 (84,18%). *Ketujuh*, Semburan lumpur lapindo akan menimbulkan kerusakan infrastruktur pada wilayah semburan. Nilai kerusakan aset dan infrastruktur akibat dampak langsung semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 5.121.634.660.000.

Kedelapan, Terputusnya jalur transportasi darat berupa jalur tol Surabaya-Gempol yang merupakan jalur utama keluar masuknya barang (eksport-impor) mengharuskan institusi/lembaga yang terkait seperti Organda, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Jawa Timur, dan Administratur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Kesembilan*, Akibat dari putusnya Tol Gempol – Porong, maka jumlah kerugian PO mengalami kerugian dari adanya penambahan solar, kehilangan rit

dan penurunan penumpang yaitu sebesar Rp 629.000,00 per hari.

Dari hasil temuan-temuan di atas ada beberapa implikasi terhadap kebijakan yang dapat dirumuskan yaitu *pertama*, dengan adanya perubahan struktur ekonomi, terutama di kecamatan yang terkena dampak langsung lumpur lapindo dari sektor primer ke tersier (perdagangan), maka dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, para pedagang harus dapat melakukan berbagai inovasi penjualan, seperti penataan barang, kebersihan tempat berjualan, menjual dengan sistem paketan, melakukan investasi lebih dari satu jenis usaha ditempat yang berbeda. *Kedua*, Pemerintah pusat maupun Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur harus segera menyediakan infrastruktur baru terutama transportasi jalan arteri Porong dan pemukiman bagi masyarakat yang rumahnya terendam lumpur, yang sampai saat masih tinggal di pengungsian. *Ketiga*, Selain penyediaan infrastruktur jalan dan perumahan, pemerintah daerah juga harus segera memindahkan para pedagang pasar lama porong ke pasar baru porong, dimana hal itu sudah menjadi hak para pedagang yang sudah membeli kavling.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Boediono, 2002, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BPFE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1997. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Ketiga)*, Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Brojonegoro, Bambang P.S, 1999. *The Impact of Currnt Economic Crisis to Regional Development Pattern in Indonesia, Paper*, LPEM-FEUI, Jakarta.
- Dick, H., Fox, J. J., & Mackie, J. (Eds.), 1993, *Balanced Development: East Java in the New Order*. Singapore: Oxford University Press.
- Haerudin, Andi, 2001, *Identifikasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Soppeng 1994/1995-1999/2000*, Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Tidak dipublikasikan.
- Isard, W. 1956. *Location and Space Economy*. Cambridge: MIT Press.
- Jaya, Iwan, 1993, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE-UI.
- Juoro, U., 1989, *Perkembangan Studi Ekonomi Aglomerasi dan Implikasi Bagi Perkembangan Perkotaan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. 37 No. 2
- Kuncoro M., 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro M., 2001, *Analisis Spasial dan Regional (Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia)*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta

- Kuncoro, M., Adji, A., & Pradiptyo, R. (1997). *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Yogyakarta: Widya Sarana Informatika.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (1st ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maulana Yusuf, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XIVII. Nomor 2: 1999
- Perroux., 1950. *Economic Development Culture Change, Growth and Development*. Hafner Publishing Company, New York
- Sjafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma, LP3ES, No.3
- Sjoholm, F. 1999. "Productivity Growth in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct Investment", *Economic Development and Cultural Change*, 47(3), 559-584
- Soepono, Prasetyo, 1998. *Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Van Thunen yang dimodifikasi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 13 No.2
- Soepono, Prasetyo, 2000. *Model Gravitasi sebagai Alat Pengukur Hinter Land dari Central Place suatu Tinjauan Teoritik*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 15 No. 4
- Soepono, Prasetyo, 1999, *Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah*, *jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.4
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, LP3ES UI, Jakarta
- Sutarno, 2002, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan PDRB Per Kapita Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas*, (1993-2000), Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Tidak dipublikasikan
- Todaro, Michael, P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta
- Warpani, Suwarjoko, 1984. *Analisis Kota dan Daerah*, Edisi ketiga, ITB Bandung